

# KUASA KIAI DALAM PEMAKNAAN POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Tsaniyatul Azizah**

*Organisasi IPPNU Yogyakarta*

**Abstrak:** Hasil dari penelitian yang telah disusun lakukan menunjukkan bahwa pertama di DIY kiai tetap memiliki kuasa dalam PKB. Ini dikarenakan kultur PKB DIY masih sama dengan NU pada umumnya. Namun, tidak semua kiai memiliki kekuasaan untuk memutuskan/ memberi kebijakan partai. Kedua, Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY ini simetris (seimbang) tidak terlibat adanya superordinasi dan subordinasi. Sehingga kekuasaan kiai di PKB ini tidak mutlak. Setiap kebijakan selalu ada kordinasi yang baik antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Ketiga, peran kiai dalam PKB DIY ada tiga bentuk. Sebagai aktor, pendukung dan sebagai partisipan. Sebagai aktor, kiai langsung terjun ke dalam garis perjuangan PKB, misalnya dalam kelahiran PKB DIY. Selanjutnya sebagai pendukung maksudnya pada peran ini, kiai mendukung terhadap PKB, namun tidak berada di garis depan dalam memperjuangkan PKB DIY. Selanjutnya yakni sebagai partisipan, adalah kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses. Jadi tidak semua kiai fokus pada PKB DIY, kebanyakan kiai tersebut lebih memilih fokus pada pesantren yang diasuhnya.

**Keyword :** Kuasa, Kiai, PKB

## A. Pendahuluan

Dalam praktik politik di hampir seluruh negara modern saat ini, baik yang bercorak demokratis maupun totaliter, kehadiran partai politik tidak dapat dielakkan. Di negara-negara demokrasi, partai politik dipakai sebagai sarana untuk mewujudkan hak-hak rakyat dalam menentukan figur yang akan menjadi pemimpinya. Sedangkan di negara-negara totaliter, partai didirikan oleh elite politik dengan pertimbangan bahwa rakyat perlu dibina agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Menggunakan segala-galanya (manusia dan benda) untuk kepentingan negara: negara yang menguasai segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik para warga negaranya. Yang dimaksud partai politik (Parpol) adalah perkumpulan (segolongan oratorang) yang seases, sehaluan dan setujuan (terutama di bidang politik). Baik yang berdasarkan

Sebagaimana terjadi di beberapa negara, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Partai politik dan demokrasi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Partai politik merupakan 'oksigen' yang menghidupkan demokrasi. Begitu juga sebaliknya. Partai politik hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam alam politik yang demokratis. Partai politik di Indonesia, terutama setelah tumbangannya era Orde Baru, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Realitas ini menandakan bahwa nafsu dan *feeling* berpolitik bangsa Indonesia sangat tinggi.<sup>2</sup>

Dalam konstalasi perjalanan politik nasional. Keberadaan gerakan keagamaan juga memiliki andil tidak kecil. Hal ini teramati berbagai aktifitas yang ditampilkannya sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan bangsa. Fenomena ini nampak jelas dan mencolok sebab banyaknya problem sosial politik yang menimpa bangsa. Partai yang bernafaskan keagamaan atau memakai atribut keagamaan lebih mudah menarik orang karena dorongan identifikasi dengan partainya. Dalam konstalasi perjalanan politik nasional. Keberadaan gerakan keagamaan juga memiliki andil tidak kecil. Hal ini teramati berbagai aktifitas yang ditampilkannya sebagai upaya menjawab dan mengantisipasi kebutuhan bangsa. Fenomena ini nampak jelas dan mencolok sebab banyaknya problem sosial politik yang menimpa bangsa. Partai yang bernafaskan keagamaan atau memakai atribut keagamaan lebih mudah menarik orang karena dorongan identifikasi dengan partainya.<sup>3</sup>

Salah satu gerakan keagamaan yang ada saat itu adalah Nahdlatul Ulama (selanjutnya dibaca NU). NU dibentuk pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ablussunnah WalJamaa'h*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar

---

partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka (Dr.s., PK Poerwantana, *Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta:1994, hlm. 6). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu.

<sup>2</sup>R. Siti Zuhro, dkk., *DEMOKRASI LOKAL; Perubahan dan Kesenambungan NilaiNilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), hlm. 74.

<sup>3</sup>Yussuf Kalla dkk, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.<sup>4</sup>

Didirikannya NU (yang artinya adalah Kebangkitan Ulama), tidak hanya didorong untuk mempertahankan paham *ablussunah waljama'ab* namun juga motif politik untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Basis NU adalah pesantren,<sup>5</sup> suatu lembaga pendidikan yang dikelola untuk mengembangkan ajaran *ablussunnah waljama'ab* (aswaja). Secara fisik, pada awalnya, pondok pesantren hanya terdiri dari elemen kiai,<sup>6</sup> santri dan bangunan rumah kiai sebagai tempat pengajian Alquran (Sukamto, 1999).<sup>7</sup> Kemudian pola ajarnya tersebut berkembang dalam berbagai pola yang berbedasesuai dengan kebutuhan dan kemampuan para kiai dalam upaya mereka mengembangkan pondok pesantren.

Keberadaan pesantren, baik dari segi fisik pemondokan maupun (ajaran) tradisi komunitasnya, menurut Sukamto, memiliki kemiripan dengan subkultural masyarakat Jawa dan Madura. Pondok itu merujuk pada bentuk bangunan masjid, sementara pola kepemimpinan kiai dalam hubungannya dengan santri mengikuti pola kepatuhan, di mana santri menjadi amat patuh pada gurunya. Tradisi kepatuhan tersebut kemudian melahirkan sikap, persepsi dan perilaku politik yang unik. Pada umumnya para jama'ah yang merupakan pengikut setia kiai menjadikan fatwa sebagai referensi utama dalam menyikapi dan mengakomodasi peristiwa dan kegiatan politik.

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU dikenal

---

<sup>4</sup><http://id.wikipedia.org> diakses 12 Maret 2012

<sup>5</sup>Pesantren, secara harfiah berarti "tempat para santri". Pesantren adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut sekolah Islam tradisional. Namun istilah tersebut bervariasi di beberapa daerah. Di Jawa dan Madura sering dipakai istilah *pondok*, di Aceh digunakan *meunasah*, dan di Sumatera Barat digunakan *Surau*. Kendati umumnya lembaga pesantren di Indonesia dikelola oleh masyarakat NU, namun bukan berarti semua lembaga pesantren merupakan NU, karena ada beberapa pesantren yang dikelola oleh ulama-ulama Islam modernis. Pesantren yang disebut terakhir ini, dari segi metode pendidikannya, sudah mengadopsi metode pendidikan modern yang sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan pesantren yang dikelola oleh NU.

<sup>6</sup>Penggunaan kata kiai ditujukan kepada seseorang pemimpin dan pengajar/ guru agama Islam. Hingga tahun 1970-an, hampir dapat dipastikan bahwa seorang kiai adalah juga pemimpin pesantren.

<sup>7</sup>Laode Ida, *NU MUDA; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 1.

sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor. NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi.

Bagi sebagian kalangan NU- terutama dalam menyikapi amanah Khittah 1926- pemurnian NU sebagai gerakan keagamaan memang tidak mutlak harus dilakukan dengan mengambil jarak yang seluas-luasnya dengan kekuasaan. Kekuasaan, konon memang harus diakrabi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak membawa *madllarat*. Dan NU adalah salah satu *moralsupportnya*. Kendati demikian, secara institusional, NU memang tidak boleh terlibat jauh dalam praktik-praktik politik praktis.<sup>8</sup>

Eurofia era reformasi yang ditandai dengan peralihan tahta kekuasaan dari Soeharto ke BJ Habibie memberikan angin segar bagi dunia perpolitikan Indonesia, khususnya kepartaian. Begitu banyak partai yang muncul pada saat itu, Para pengamat menilai fenomena ini adalah buah dari adanya akumulasi berbagai persoalan ideologi politik bangsa yang hampir tigapuluh tahun lebih diberlakukan secara diskriminatif dalam pembentukan *platform* bangsa ini. NU sendiri rupanya tidak mau ketinggalan. Setelah hampir tiga dasawarsa NU juga ikut tergerus marjinalisasi politik penguasa, ormas ini setidaknya-tidaknya digugah warga *jam'iyah* untuk berpartisipasi di kancah perpolitikan nasional melalui pendirian partai. Hal ini tersirat dari banjirnya surat yang masuk ke Pengurus Besar NU (Selanjutnya dibaca PBNU) yang dikirim kaum *Nabdliyyin*, sehari setelah mundurnya Soeharto. Hampir semua usulan bernada sama, yakni menginginkan agar secepat mungkin PBNU membantu mewujudkan adanya satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU.

Keinginan itu direspon oleh PBNU yang kemudian membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya dibaca PKB). PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh tokoh-tokoh terkemuka NU dan ditasbihkan sebagai satusatunya wadah berpolitik bagi anggota organisasi sosial keagamaan tersebut. Berpijak pada AD/ART dan *Mabda Syyasi*, basis ideologi PKB adalah Pancasila dan memiliki sifat sebagai partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang

---

<sup>8</sup>Imam Nahrawi, *MORALITAS POLITIK PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 14.

dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. ebagai partai yang lahir dari rahim NU, baik secara struktural maupun kultural, PKB mewarisi NU. Secara struktural, dalam organisasinya PKB memiliki dua institusi, yakni Dewan Syuro sebagai institusi penentu kebijakan umum dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana kebijakan partai. Hal ini persis sebagaimana yang ada di NU, yakni Lembaga Syuriyah dan Tanfidziyah.<sup>9</sup>

Tujuan politik PKB adalah keadilan (*justice*). Jika negara yang dibangun berlandaskan keadilan, dapat diandaikan bahwa semua warga akan bekerja dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Tentu panjang jalan dilalui PKB untuk sampai pada misi dan tujuan politiknya. Dalam kerangka perjuangan panjang itu pula, PKB menunjukkan keeksistensiannya dengan tampilnya KH. Abdurrahman Wahid, salah satu kader terbaik PKB sebagai Presiden Indonesia. Kekuatan yang berpengaruh atas kemenangan partai yang ikut berkompetisi di setiap pemilu khususnya di PKB adalah kiai. Sosok kiai menjadi incaran para politisi untuk dimintai restunya, atau bahkan melibatkannya dalam kepengurusan partai. Tim sukses yang telah dibentuk para *header* partai menunjukkan bahwa peran para kiai yang signifikan akan dapat meraup suara. Dalam menentukan calon presiden-calon wakil presiden atau calon legislatifcalon wakil legislatif sekalipun, tidak akan terlepas dari keikutsertaan para kiai yang punya basis massa yang riil. Bagaimanapun relasi kiai dan dunia politik atau dengan para politisi dalam kehidupan politik di Indonesia tetap menjadi hal yang menarik. Terutama PKB, yang aktifisnya terdiri dari kiai.<sup>10</sup> Selain itu, PKB sebagai partai yang didirikan para ulama NU ternyata menyimpan potensi konflik yang luar biasa dahsyat. Konflik dan perpecahan demi perpecahan organisasi itu merupakan fakta tak terbantahkan. Sampai saatini, ada tiga episode konflik. Pertama, Mathori Abdul Djalil. Kedua, Alwi Shihab dan ketiga, Muhaimin Iskandar.

Dalam setiap episode konflik berimbas pada keberadaan kiai, baik yang ada dalam struktur PKB maupun yang berada di luar struktur partai. Sejalan dengan kultur NU, kiai menduduki posisi dan peran yang sangat penting. Kiai telah dianggap sebagai pemegang otoritas moral, pembawa “pesan langit” dan label surgawi lainnya. Dalam struktur PKB, kiai ditempatkan dalam posisi Dewan Syuro, lembaga perumus kebijakan tertinggi partai sekaligus pemegang otoritas moral untuk mengawasi

---

<sup>9</sup>Khoirudin, *Menuju Partai Advokasi* (Yogyakarta:Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), hlm. 9.

<sup>10</sup>H. Matori Abdul Djalil, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 1999) hlm. ix.

pergerakan politik dalam upaya menggapai cita-cita politik PKB. Konflik itu juga menumbuhkan citra yang kontradiksi terhadap keberadaan kiai. Antara citra pemersatu, *problem solver*, tokoh panutan dan label mulia lainnya yang melekat pada kiai dengan realitas politik di PKB yang justru penuh sesak dengan konflik. Munculnya PKB hingga menjadi seperti sekarang tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran besar para kiai dalam proses kelahirannya. Kiai adalah figur dalam tradisi NU yang selalu dimintai saran sekaligus pendapat dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi ini.<sup>11</sup>

Dalam kondisi seperti ini kita bisa menelaah, bahwa sosok kiai yang awalnya hanya dalam lingkup pesantren desa yang mentransformasikan nilai-nilai agama pada masyarakat lokal, ternyata telah ditempatkan pada posisi yang lebih strategis. Karena para kiai dianggap dapat mengubah *mind-set* masyarakat yang lebih luas dalam berbagai bidang, termasuk politik di Indonesia. Dalam konteks inilah, menarik untuk mencermati dan menelaah kuasa kiai dalam pemaknaan politik dari partai yang mempunyai basis massa orang Islam, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa.

## B. Ideologi PKB

### 1. PKB Sebagai Partai Politik

PKB adalah salah satu partai yang bersama dengan puluhan partai baru lainnya, didirikan pasca tergulingnya kekuasaan *absolute* Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Sebagaimana diketahui, kekuasaan otoritarian Orde Baru telah mengerdilkan potensi politik rakyat dengan membatasi jumlah partai politik menjadi tiga: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tujuannya jelas, agar pemerintah dapat menyeleksi dan mengawasi secara ketat setiap partisipasi politik rakyat. Padahal, ironisnya, ketersumbatan partisipasi politik ini justru menumbuhkan dan menyemaikan bibit-bibit perlawanan, dan meledak medio Mei 1998. Sehingga, ketika rezim Orde Baru runtuh, potensi dan aspirasi politik rakyat tersebut mengejawantahkan melalui terbentuknya partai-partai baru dari berbagai macam golongan.<sup>12</sup>

Awal mula terbentuk PKB adalah pada tanggal 3 Juni 1998, PBNU membentuk Tim Lima yang ditugaskan untuk memenuhi dan merespon aspirasi warga NU yang menginginkan adanya partai untuk menampung

---

<sup>11</sup>Imam Nahrawi, *MORALITAS POLITIK PKB; Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 21.

<sup>12</sup>Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), hlm. 1.

aspirasi warga *nabdliyyin*. Tim Lima tersebut adalah K.H Ma'ruf Amin sebagai ketua Tim Lima (*Rais Syuriyah*/ koordinator harian PBNU) dengan anggota K. H Dawam Anwar(Khatib Aam PBNU), Dr. H. Agil Sirajd, MA( Wakil Katib PBNU), H. M. Rodhi Munir, SE (Ketua PBNU), dan H. Ahmad Bagja (Sekjen PBNU).<sup>13</sup> PBNU juga membuat Tim Asisten, yang diketuai oleh: Drs. Junaidi MBA (wakil sekjen PBNU), dengan anggota: H. Muchidin Aburusman, H. M. Fachri Thoha Ma'ruf, Drs. H. Abdul Aziz M. A., Drs. H. Andi Muarli Sunrawa, H. M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin Zuhri, Drs. Said Amin Husni, dan Drs. Muhaimin Iskandar, yang bertugas untuk membantu dan mempercepat kerja Tim Lima.<sup>14</sup> Setelah Tim Lima dan Tim Asisten mengadakan rapat dan pertemuan akhirnya dapat menyelesaikan tugasnya, dan menyerahkan hasil akhir rancangan pembentukan partai politik tersebut. Partai politik itu kemudian diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa yang bergambar jagad nusantara Indonesia dan dikelilingi bintang sembilan sebagai lambang khas NU.

Sebagai partai yang didirikan untuk menampung aspirasi politik warga *nabdliyyin*, maka jangkauan PKB tidak hanya terpusat pada satu tempat saja, PKB Juga menjangkau berbagai tempat, mulai dari provinsi hingga ke desa. Salah satunya yakni di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY). DIY adalah Daerah Istimewa setingkat Provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan bekas (Negara) Kesultanan Yogyakarta dan [Negara] Kadipaten Paku Alaman. DIY yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. DIY yang memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten yakni Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Dan yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010, DIY memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km<sup>2</sup>. Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 langgar, 1877 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng. Jumlah pondok pesantren

---

<sup>13</sup>Hairus Salim dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 202.

<sup>14</sup>Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* (Gama Media: Yogyakarta, 2001), hlm. 219.

pada tahun 2006 sebanyak 260, dengan 260 kyai dan 2.694 ustadz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah.

## 2. Ideologi PKB

Secara sederhana, dalam konteks politik, ideologi adalah sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan, dan memberi strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan (*weltanschauung*) yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik<sup>15</sup>

Sebagaimana PKB pusat, asas PKB DIY adalah Pancasila, sedangkan prinsip dasar perjuangan yang dianutnya adalah menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai *Islam ahlus Sunnah wal Jama'ah*.

Tujuan pendirian PKB adalah (1) mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945; (2) mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir-batin, materialspiritual; (3) mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah. Asas prinsip, dan tujuan di atas, jelaslah bahwa PKB merupakan partai terbuka; artinya partai ini bisa dimasuki oleh siapapun dan dengan dilatar belakangi mazhab atau organisasi manapun karena partai ini tidak semata-mata partainya orang NU. Namun demikian, kenyataan yang acapkali terlontar oleh penggagas PKB menggambarkan bahwa PKB merupakan partainya orang NU. Memang harus dibedakan PKB dan NU. PKB adalah partai politik dan hanya sebagian dari aktivitas orang-orang NU, sedangkan NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang cakupan kegiatannya lebih luas daripada partai politik.<sup>16</sup>

## 3. Garis Perjuangan PKB

Sebagai partai yang dimotori oleh para ulama, PKB adalah salah satu partai yang diharapkan dapat memberantas ketidakadilan dan kesewenangwenangan yang selama ini dipraktekkan oleh para pemimpin negara. Seluruh warga *nabdliyyin* memang berharap bahwa PKB dapat membawa perubahan yang signifikan bagi kaum nahdliyyin, karena partai ini adalah buah pemikiran dari para ulama yang notabenenya mempunyai

<sup>15</sup>Khairussalim dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm 208-209.

<sup>16</sup>Ali Anwar, *AVONTURISME NU: Menjejak Akar konflik-Kepentingan Politik Kaum Nabdhliyyin* (Bandung: Humaniora, 2004), hlm. 157.



pemikiran yang bersih, karena selalu dikontrol oleh norma agama dan norma susila. Secara ideal, PKB memiliki sifat inklusif, artinya keanggotaan dan orientasi partai tidak hanya dikhususkan warga NU, melainkan untuk seluruh warga Indonesia. Di samping itu, platform PKB disusun berdasarkan keselarasan aspek regiusitas dan kebangsaan. Keduanya dianggap tidak bertentangan satu sama lain, melainkan saling mengisi.<sup>17</sup>

Keterbukaan perjuangan PKB dapat dilihat dalam jbaran perjuangan PKB yang telah digagas:

1. Dalam Bidang Politik

PKB berpendirian bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk final bagi bangsa Indonesia. PKB secara tegas menolak dan menentang segala upaya pemecah belah persatuan dan persaudaraan bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, PKB memperjuangkan agar setiap penataan kehidupan kemasyarakatan dan kenepegaraan mencerminkan kemandirian rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya.

2. Dalam Bidang Ekonomi

PKB menyadari bahwa tidak ada sistem perekonomian yang murni kapitalisme atau pun sosialisme. Tetapi yang pasti, sistem perekonomian yang bertumpu pada pasar adalah sesuatu yang tidak mungkin lagi dibendung. Sehingga perjuangan PKB adalah membantu terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial melalui sistem ekonomi pasar yang memberikan ruang gerak bagi keterlibatan masyarakat secara luas dan yang bertumpu pada kemampuan individu serta kerja sama antara sesama anggota masyarakat untuk bisa memaksimalkan peran masing-masing. Partai memberikan jaminan atas terpeliharanya kepemilikan harta benda oleh individu (*hifzu al-mal*) dan mendorong agar negara menjamin persamaan kesempatan berusaha bagi semua pelaku ekonomi tanpa diskriminasi, tetapi dengan memberikan perhatian khusus pada upaya upaya untuk memberdayakan para pelaku dalam usaha dan industri kecil dan rumah tangga, terutama di daerah pedesaan.

3. Dalam Bidang Hukum

PKB mmeperjuangkan terwujudnya negara yang berdasarkan hukum

---

<sup>17</sup>Hairus Salim dkk, *Tujuh Mesin PendulangSuara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 229.

(*rechstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Partai mendorong negara untuk menjamin tegaknya *rule of law* guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Partai memperjuangkan adanya supremasi hukum yang bekerja secara profesional.

## C. Kuasa Kiai

### 1. Kelahiran PKB

Kelahiran PKB di DIY, tentunya tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan yang muncul di sekeliling NU. Orang-orang teras di organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut menyadari betul bahwa massa NU adalah modal terbesar yang paling utama. Yang bisa menjadi alat paling efektif di dunia politik, khususnya kepartaian. Bila melihat pada proses kelahiran PKB, tentunya banyak kiai dan tokoh NU yang tidak bisa dilupakan. Begitu pula yang terjadi di PKB DIY. Banyak kiai, pengasuh pondok pesantren dan tokoh NU yang tidak bisa dilupakan jasanya dalam pembentukan PKB. Mereka di antaranya adalah K.H. Zainal Abidin Munawwir, K. H Warson Munawwir, K. H Muhtar Dawam, K. H. Mabarun Al-Fataah dan K. H Nawawi. Pada saat pembentukan PKB DIY, kiai yang terlibat merupakan aktivis NU pada saat itu.<sup>18</sup>

Keterlibatan kiai dalam mendirikan PKB di DIY, berangkat dari berbagai macam alasan. Ada yang ditunjuk oleh DPP PKB, ada juga yang dengan sukarela mengajukan diri menjadi fasilitator dalam mendirikan PKB DIY.<sup>19</sup> Di DIY, tokoh-tokoh yang membidani kelahiran PKB tidak terbatas pada orang-orang yang saat itu menjabat sebagai pengurus NU, baik Syuriah maupun Tanfidziyah. Para kiai *kebos* di daerah-daerah, yang justru tidak ingin tersita pada jabatan struktural di NU juga mempunyai andil sama besarnya. Banyak kiai besar yang rata-rata berposisi sebagai pemangku pondok pesantren yang cukup dikenal di kalangan masyarakat DIY, terutama warga NU, memberi masukan dan nasihat terus menerus mengenai harapan dan cita-cita pendirian sebuah partai yang difasilitasi oleh NU.

Bahkan di kalangan para kiai tersebut tidak sedikit yang memberikan usulan *brilian* bagaimana seharusnya prosesi dan mekanisme pendirian partai politik di tubuh NU serta mewanti-wanti agar tidak sekali-kali

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan KH. Moh Yasin (Dewan Syura PKB DIY sekaligus Pengasuh PP. An- Nur Bantul) pada 14 Juli 2012 .

<sup>19</sup>Wawancara dengan KH. Moh Yasin (Dewan Syura PKB DIY sekaligus Pengasuh PP. An- Nur Bantul) pada 14 Juli 2012 .

melupakan kesejarahan NU yang dulunya pernah menjadi partai politik serta wejangan-wejangan konstruktif lain. Hal paling penting dalam mencermati tokoh di belakang layar tersebut adalah banyak di antara para kiai tersebut yang mengantisipasi terlebih dahulu mengenai posposisi NU-PKB dan PKB di Yogyakarta nantinya. Sebab, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Lebih baik menegaskan posisi masing-masing dan prosedur yang selama ini menjadi patokan di tubuh NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak hanya terbatas atau dibatasi oleh satu partai saja. NU adalah milik semua warga *nabdliyyin* dan bangsa Indonesia, bukan hanya PKB.

Kiai merupakan figur yang sangat berpengaruh di PKB. Salah satu pilar yang menopang kekuatan partai ini ada pada kiai. Pada awal masa pendirian PKB DIY, para kiai ini diharapkan dapat memerankan dua fungsi, pertama sebagai sumber rujukan atau legitimasi teologis dalam pengambilan kebijakan partai dan kedua sebagai pendulang suara. Peran yang pertama meliputi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internal. Setiapkali hendak mengambil keputusan politik yang sangat penting, para elite PKB di Yogyakarta termasuk terlebih dahulu menyampaikannya atau mendiskusikan sikap politik itu kepada kiai-kiai yang berpengaruh dan sangat dihormati di masyarakat.

Dalam proses perjalanannya, pada prinsipnya, orang-orang yang dipilih untuk mengawal PKB haruslah orang yang berwawasan kekiaian, tunduk pada kiai, dan memahami dinamika kiai, terutama kiai NU. Sebab, PKB tidak mungkin dan tidak akan berdiri tanpa sentuhan dan pertimbangan matang dari kiai. Itulah mengapa Salahudin Wahid Pernah berujar, "Gus Dur percaya bahwa sosok kiai adalah segalanya, sosok *sarwa linuwih* yang mampu memberikan jawaban atas peristiwa yang sedang dan bahkan akan terjadi. Eksistensi PKB berarti juga menunjukkan eksistensi kiai."<sup>20</sup>

## 2. Pemaknaan Ideologi PKB

Seperti lazimnya pendirian sebuah partai politik, maka akan terjadi perdebatan tentang ideologi partai tersebut. Memang sebagian menganggap bahwa warna dan kemajuan partai akan sangat ditentukan oleh arah mana yang akan dituju oleh sebuah partai politik. Basis Ideologi dari PKB adalah Pancasila bukan Islam. Oleh karena itu, PKB merupakan partai yang inklusif, bukan eksklusif. Inklusif dalam artian, PKB terbuka bagi siapa saja, tidak hanya orang NU yang bisa masuk PKB, orang non NU pun juga bisa masuk PKB.

---

<sup>20</sup>Koirudin, *Menuju Partai Advokasi* (DIY: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), hlm.33.

Islam adalah agama tauhid dan agama akhlak. Untuk itu, PKB menjadi partai yang berasaskan terbuka dan tidak berasaskan Islam karena ingin memperjuangkan akhlak atau moralitas politik yang terpuji dengan pendekatan budaya melalui pemberdayaan dan pembelaan terhadap masyarakat. Namun, di wilayah DIY ini, para kiai-kiai berpendapat dan berkeinginan bahwa pemahaman inklusif di sini perlu ditekankan bahwa untuk struktur kepengurusan DPW PKB DIY, haruslah orang NU. Baik Mustasyar, Dewan Syura maupun Dewan Tanfidz. Berbeda dengan simpatisan yang lain, memang diperbolehkan siapapun masuk.<sup>21</sup>

Selama DPW DIY didirikan, tidak pernah Dewan Mustasyar ataupun Dewan Syura yang bukan orang NU. Beda halnya dengan Dewan Tanfidz. Pada awal berdirinya PKB, ada salah satu Dewan Tanfidz yang bukan orang NU, yaitu adalah Bapak Purdi Candra. Seorang Nasionalis sekaligus pengusaha (pemilik Primagama).<sup>22</sup>

Rujukan atau narasi awal yang dijadikan sebagai dasar pembentukan partai, sebagaimana tertuang dalam naskah deklarasi dan *Mabda' Sijasyiy* PKB adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bukan nilai atau cita-cita politik negara Islam. PKB yang tidak berasas dan berideologi Islam ini karena memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bersifat heterogen dan sangat plural. Tidak semua warga *nabdliyyin* setuju dengan ideologi yang telah disepakati itu. Mereka beranggapan bahwa ideologi pancasila telah melanggar *khittah* 26 NU.<sup>23</sup>

Yang perlu dicermati, walaupun bukan partai yang berasaskan Islam, namun simbolisme Islam atau NU masih diekspose secara jelas dalam lambang, istilah-istilah politik, struktur partai dan ritual seremoni kegiatan partai. Lambang PKB sangat jelas mengadopsi dari lambang NU (bola dunia dan bintang sembilan). Istilah-istilah politik dalam komunikasi politik keseharian para aktifisnya sangat kental dengan nuansa NU. Struktur partai terdiri dari lembaga Syura sebagai lembaga tertinggi dengan kewenangan ada pada perumusan kebijakan secara umum dan lembaga Tanfidz sebagai institusi pelaksana (eksekutif), merupakan adopsi serupa dari NU (Syuriah dan Tanfiḏīyah). Kosakata politik banyak memakai Bahasa Arab yang bagi sebagian besar masyarakat masih memandangnya sebagai hal yang dekat dengan Islam.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan KH. Moh Yasin (Dewan Syura PKB DIY sekaligus Pengasuh PP. An- Nur Bantul) pada 14 Juli 2012.

<sup>22</sup>Wawancara dengan KH. Moh Yasin (Dewan Syura PKB DIY sekaligus Pengasuh PP. An- Nur Bantul) pada 14 Juli 2012.

<sup>23</sup>Wawancara dgn Bpk. Ach Riyanto, S. Hi., Pengurus Dewan Tanfidz DPW PKB DIY, 6 Juli 2012.

Di DPW PKB DIY sendiri, upacara kegiatan partai kental dengan nuansa Islam dan tradisi NU. Misalnya, pembukaan acara Musyawarah Kerja Wilayah Cabang Sleman di PP. Al- Qodir Cangkringan yang diawali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Pidato-pidato pimpinan partai selalu diawali dengan mukadimah berbahasa Arab sebagaimana lazimnya dalam forum pengajian NU. Hampir semua aktifisnya (laki-laki dan perempuan) dalam kegiatan partai selalu memakai baju muslim. Pemakaian peci dengan memperlihatkan dahi bagi lakilaki dan jilbab bagi perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas itu (NU). Ulama/kiai, yang berada di struktur partai maupun di luar struktur, kebanyakan memakai sarung, surban atau peci haji dan kain (mirip saelendang) yang diselempangkan di bahu. Kadang-kadang atribut itu masih ditambah dengan untaian tasbih yang selalu terenggam ditangan.

Kegiatan-kegiatan partai banyak dilakukan di pesantren meskipun hanya sekadar ritual pembukaan acara. Selain itu, secara pribadi, sebagian elite PKB sering menyelenggarakan acara-acara bersifat ritual keagamaan seperti mujahadah, ziarah kubur dan sebagainya. Bpk. Ach. Riyanto misalnya, sering berziarah ke makam para wali bersama pengurus yang lain. Salah satu agenda besar DPW PKB yang terlaksana baru-baru ini adalah Harlah NU, dengan mengadakan mujahadah akbar bersama Habib Syekh Assegaf. Yang dihadiri oleh ribuan *nahdliyyin* dan ratusan kiai dari seluruh pelosok DIY & Jateng. Turut hadir pula ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa *Cak* Imin. Dalam konteks itu, kehadiran peserta mujahadah terutama dari kalangan kiai akan semakin meneguhkan citra akseptabilitas, legitimasi sekaligus dukungan politik dari kalangan ulama terhadap kapasitas, posisi dan peran politik dari elite PKB tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Perjuangan PKB

Dari aspek sejarah kelahiran PKB memang “disengaja” dibentuk oleh para kiai-kiai NU, untuk mewartakan aspirasi politik warga nahdliyyin yang selama ini dibiarkan disalurkan ke mana-mana. Kesengajaan ini disadari membawa konsekuensi bahwa setelah terbentuk maka akan dilakukan upaya-upaya untuk mengindahkan aspirasi politik warga pada tempat yang lebih tepat dan bisa lebih menjamin aspirasi warga NU.

Bukan hal berat bagi NU/PKB untuk memobilisasi warganya. Mobilisasi tersebut dapat dilakukan melalui struktur yang sudah mapan, melalui simpul-simpul pondok pesantren, sekolah, rumah sakit, para kiai. Struktur partaipun mampu menjangkau hampir seluruh wilayah/

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara Bpk Ach. Riyanto, Pengurus Dewan Tanfidz DPW PKB DIY, 6 Juli 2012.

kabupaten di nusantara. Di pulau Jawa bahkan ammpu menembus sampai struktur tingakt ranting/desa. Kontribusi partai, sebagai bentuk perjuangan PKB terhadap pembangunan bangsa ini dapat diukur dari apa dan bagaimana landasan program yang dijalankan. Kinerja partai secara umum juga dapat dibaca dari bagaimana sumberdaya partai merumuskan program-program politik tersebut secara berkelanjutan dan tidak terjebak pada politik jangka pendek.

Pengurus DPW DIY juga telah merancang beberapa program kerja yang diharapkan bisa, salah satunya yakni Akademi Politik Bangsa (Akpollbang). Setiap akan mengadakan kegiatan seperti ini, terlebih dahulu mereka dewan Tanfidz akan "*sowan*" kepada dewan Syura selaku penentu kebijakan. Namun, ternyata proses seperti ini hanya lewat personaliti saja antara pengurus dengan kiai A atau kiai B, bukan secara kelembagaan antara Dewan Syura dan Dewan Tanfidz.<sup>25</sup>

Di DIY sendiri dalam bidang sosial, PKB juga sudah menembus tingkat ranting, dan disambut suka cita oleh warga desa tersebut. Selain dengan perealisasiian program kerja, PKB DIY sebagai partai politik juga eksis mengikuti Pemilihan Umum yang terselenggara empat tahun sekali itu.<sup>26</sup>

Fakta yang diperoleh dari hasil beberapa kali Pemilu, Bantul merupakan daerah dengan pemilih terbanyak. Diikuti Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan terakhir kotamadya. Selain penduduk yang berjumlah besar, juga terdapat kiai dengan pondok pesantrennya yang menjadi rujukan masyarakat sekitar. Perolehan suara saat momen Pemilu tersebut tidak lepas dari campur tangan kiai. Jika dilihat dari perolehan suara dari keikutsertaan PKB DIY mnegikuti pemilu, maka bisa dilihat bahwa ada penurunan jumlah pemilih dari tahun ke tahun. 92 Beberapa penyebab di antaranya adalah, adanya perpecahan suara ke Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU), menurunnya wibawa pemimpin partai yang ada, kurang terorganisirnya partai dll.<sup>27</sup>

#### 4. Dinamika PKB

Sebagai bangsa kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, agama, serta adat dan budanya, maka Indonesia tampil sebagai sosok bangsa yang sangat majemuk. Di satu sisi merupakan sebuah kekayaan tak terhingga harganya, namun di sisi yang lain hal ini rawan

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Kiai Masrur, Ketua Dewan Syura DPW PKB DIY sekaligus pengasuh PP. Al-Qodir Cangkringan

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Kiai Djawiz Dewan Syura DPW PKB sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amumarta.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Kiai Moh. Yasin, Dewan Syura DPW PKB sekaligus pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Bantul.

mengundang kelahiran perbedaan-perbedaan yang akan melahirkan konflik multidimensi.

Konflik politik juga terjadi pada PKB. Masih segar dalam ingatan di level nasional, bagaimana tajamnya konflik yang terjadi antara Gus Dur dan Mathori Abdul Jalil, persoalannya demikian pelik sehingga penyelesaiannya sampai melalui jalur pengadilan. Kasus yang lain adalah penonaktifan Saifullah Yusuf, penonaktifan Alwi Sihab yang terus mengundang kontroversi. Di tingkat daerahdaerah juga tidak sedikit konflik yang terjadi, bahkan sampai pada pemecatan kepengurusan, pemecatan keanggotaan dan sebagainya.<sup>28</sup>

Yang paling mutakhir adalah konflik yang terasa besar masalah Muktamar II PKB, konflik ini cukup serius karena riil melahirkan dua kubu yaitu kubu Gus Dur- Muhaimin Iskandar dengan Kubu Alwi Sihab-Saifullah Yusuf. Persoalan yang dialami PKB pasca Muktamar II memang membutuhkan kerja keras untuk mencapai sebuah solusi antara kedua kubu yang bertikai. Sekilas rasanya agak janggal apabila kita mencoba menerka akar masalah dari konflik di atas. Beberapa tahun yang lampau bisa kita saksikan kedekatan mereka, kepatuhan. Namun kondisi sekarang berseberangan prinsip, komitmen, dan strategi perjuangan dalam partai politik. PKB, bahkan juga mengalami konflik demikian. Begitupula beberapa konflik yang terjadi di DPW PKB DIY. Seperti yang dipaparkan oleh Kiai Hafidz Abdul Qodir bahwa di DPW PKB DIY sendiri juga pernah mengalami konflik internal disebabkan karena adanya kepentingan pribadi. Bermula ketika DPW PKB DIY melakukan pemilihan pengurus. Setelah kepengurusan terbentuk, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan (Selanjutnya dibaca SK) dari pusat untuk mendapat pengesahan dan legalitas kepengurusan. Namun, ternyata SK tersebut tidak sesuai dengan hasil pemilihan. Maka ini membawa akibat hukum pengurus yang namanya tidak tercantum, tidak dapat dilantik.

Di PKB DIY, hal seperti itu tidak hanya terjadi sekali saja. Ini menimbulkan sejarah pahit bagi beberapa kiai yang ada di PKB DIY. Seperti dipaparkan KH. Hafidh Abdul Qadir di atas, hal ini bermula ketika DPW PKB mengadakan musyawarah untuk Muskerwil untuk pemilihan ketua Dewan Tanfidz DPW PKB DIY selanjutnya. Namun ternyata Surat Keputusan dari DPP PKB tidak sama dengan hasil musyawarah DPW PKB DIY. Hingga ketegangan pun terjadi di PKB, terutama antara DPP PKB dengan DPW PKB DIY dan internal DPW PKB DIY sendiri. Karena konflik terus berlanjut dan tidak ditemukan titik terang, maka

---

<sup>28</sup>Imam Nahrawi, *Moralitas Politik PKB: Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai Modern* (Malang: Averroes Press, 2005), hlm. 52.

kepengurusan DPW PKB PKB dibekukan. Saat itu, ketua Dewan Tanfidznya adalah Ibu Ida(yang sekarang pindah ke Partai Persatuan Pembangunan). Kepengurusan DPW PKB DIY dibekukan selama setengah tahun dan selama itu dipimpin oleh seorang Karteker. Dan Karteker saat itu adalah Bapak Lalu Nisbah.

Setelah tugas karteker selesai, maka diadakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) untuk membentuk kepengurusan baru lagi. Saat itu, calon yang diajukan ada tiga orang yakni Agus Wiyarto, Sukamto dan Nur Haris. Di antara tiga orang tersebut, Nur Haris lah yang paling direstui oleh kiai-kiai yang ada. Namun beberapa hari sebelum hari- H Muskerwil, tiba-tiba saja Nur Haris mengundurkan diri dari calon ketua tanpa ada alasan yang jelas. Diduga Nur Haris mendapat banyak tekanan dan ancaman baik secara psikis maupun psikologis dari saingannya, Agus Wiyarto. Akhirnya, suara yang sebenarnya untuk Nur Haris dialihkan kepada Sukamto. Karena para kiai berpendapat bahwa, walaupun tidak jauh berbeda dengan Agus Wiryoto, Sukamto sedikit lebih baik. Kiai tidak menginginkan Agus Wiryoto menjadi pemimpin DPW PKB, karena menurut anggapan sesepuh, dia sangat resisten, tidak amanah, menghalalkan segala cara untuk mendapat apa yang dia inginkan. Bahkan dari segi *ubudiyahnya* pun juga kurang mencerminkan sebagai warga NU.

Setelah hasil pemilihan, akhirnya terpilihlah Sukamto sebagai ketua DPW PKB DIY. Namun, lagi- lagi hal yang sama terjadi. Surat Keputusan yang turun dari DPP PKB, Agus Wiyarto lah yang menjadi ketua dan banyak perubahan pada struktur kepengurusan. Kontan saja hal itu membuat para peserta Muswilub kecewa dan berang. Berbagai cara ditempuh kiai untuk mengembalikan keadaan seperti hasil pemilihan di DIY. Di antaranya adalah pengajuan protes kepada DPP PKB, sowan ke Gus Dur untuk menyampaikan mosi tidak percaya. Para kiai juga sudah berusaha mengajak mediasi dan dialog DPP PKB, namun samasekali tidak direspon oleh DPP PKB.

Konflik yang fatal ini pun membawadampak yang luar biasa pada PKB DIY. Karena kecewa, kiai banyak yang memutuskan untuk ikut PKNU. Kemerosotan suara terjadi di berbagai daerah. Ketidak aktifan kepengurusan Dewan Tanfidz era Agus, dan lain lain. Tidak hanya itu, karena keegoisan pribadi, terkadang konflik juga timbul saat musawarah mengenai siapa yang akan maju menjadi wakil rakyat atau anggota dewan. Namun, untuk beberapa masalah dan konflik kecil, dilakukan mediasi oleh Dewan Syura. Upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan model mediasi tidak dilembagakan secara formal. Model mediasi itu lebih bersifat kultural dan insidental karena masing-masing kiai yang terlibat konflik



mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan konfliknya. Adakalanya juga konflik yang terjadi itu terselesaikan sendiri tanpa ada resolusi konflik.

Terlepas apapun motif sebuah konflik dalam partai politik maka yang menjadi akar masalahnya adalah kepentingan-kepentingan semata. Kepentingan individu atau kelompok yang merasa terganggu bahkan berbenturan dengan individu/kelompok lain adalah keniscayaan lahirnya konflik dalam sebuah politik. Tradisi politik NU yang selama ini didominasi para kiai, selama ini memang tidak lepas dari dominasi para kiai. Dengan kata lain kalangan PKB akan tetap dalam rel tradisi politik yang dikendalikan oleh ulama-NU. Dalam menghadapi konflik pun juga demikian, kader partai yang terlibat konflik selalu mencari solusi, nasehat atau apapun namanya dari kiai. Meskipun pada akhirnya, yang kemudian banyak terjadi adalah bulan mencari rujukan namun mencari dukungan dan legitimasi yang dapat mengamankan posisi politiknya. Kiai itu juga tidak harus orang yang duduk dalam struktur PKB namun yang pasti adalah orang yang memiliki pengaruh kuat di kalangan NU.

#### **D. Penutup**

Keberadaan seorang kiai pada komunitasnya adalah lebih banyak mengisi ruang-ruang kosong sebagai implementasi pola-pola kepemimpinan yang paternalistik, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya menganut pola *patron* klien. Dengan pola hubungan yang demikian maka kiai akan menjadi figur sentral, panutan, tokoh yang berpengaruh di komunitasnya. Peranan strategis kiai dalam politik, kiai mempunyai banyak keuntungan sosial atas masyarakatnya. Kiai mampu mempengaruhi, memobilisasi, mengarahkan dengan baik terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, masyarakat sebagai klien maka kepatuhan pada pemimpinnya, kiainya nyaris tak bersyarat. Berdasarkan pemaparan pada sebelumnya, maka akan didapat dua hal sebagai berikut:

*Pertama*, Bahwa di DIY, kiai tetap memiliki kuasa dalam PKB. Ini dikarenakan kultur PKB DIY masih sama dengan NU pada umumnya yang sangat patuh dan taat kepada kiai. Kalaupun ada pergeseran maka belum begitu signifikan. Namun, tidak semua kiai memiliki kekuasaan untuk memutuskan/ memberi kebijakan partai. *Kedua*, Kekuasaan kiai dalam PKB di DIY ini simetris (seimbang) tidak terlihat adanya superordinasi dan subordinasi. Sehingga kekuasaan kiai di PKB ini tidak mutlak. Setiap kebijakan selalu ada koordinasi yang baik antara Dewan Tahfidz dan Dewan Syura.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,
- Al-Asqalani, Hifz, Penerjemah, Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang : Penerbit Toha Putra, 195.
- At-Turmudzi, *Al-Jamius Sahibb Sunan at-Turmuzy*, Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2007.
- Muhammad, Zuhri Dipl, TAFL. Dkk, *Terjemahan, Sunan At-Turmidzi, Semarang: Cv. Asy-Syfa', 1922.*
- Abidin, Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Cet I, Bandung : Alumni, 1978.
- Abdul Qodir, Audah, *At-Tasyri'I al-Jana'I al-Islam*. Kairo: Dar al-Urubah, 1963.
- Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Asus Pihartono, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ciecik, Farha. 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chausiri, Achmad, *Istri dan Ketidakadilan Gender*, dalam menggugat harmoni Nur Hasyim (Peny), Yogyakarta: Rifka Annisa Womaen's Crisis Center, 1999.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abdul Djalil, Mathori, H, *Dari NU untuk Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- Al-Mawardi, Abu Hasan *Al-Abkan Asulthaniyah wa Wilayatub al-Diniyyah, Musthofa al-Asabil Halabi*, Mesir, Cetakan II Anam,

- Khoirul, *Peran Politisi Kiai NU di Tengah Krisis Multi Dimensional (Studi Kritis Terhadap Peran Abdurrahman Wabid Sebagai Presiden RI dan Kiai NU dalam Konsistensi Pribumisasi Nilai-Nilai Keislaman)*. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Anwar, Ali, Dr. *AVONTURISME NU: Menjejak Akar konflik-Kepentingan Politik Kaum Nabdhyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.
- Bahar, Hesbul, *Analisis Kebijakan Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Atas Konsep Advokasi)*. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Daman, Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Gama Media: Yogyakarta, 2001
- Dhafir, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Djazuli Prof. H.A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslabatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Faridh, Miftah, *Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia*, dalam jurnal Sosioteknologi, Edisi 11 tahun 2007
- Fealy, Greag, *IJTIHAD POLITIK ULAMA; Sejarah NU 1952-19679*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Ghufroni, M, *TAKZIRAN DAN RELASI KUASA DI PONDOK PESANTREN (Studi tentang Fenomena Kekerasan di Pondok Pesantren Majlissut Ta'allum Kota Semarang) Tesis tidak diterbitkan*. Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Ida, Laode, *NU MUDA; Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Kalla, Yusuf dkk, *Pergulatan Partai Politik Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khairussalim dkk, *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Khan, Qamaruddin, *The Political Thought of Ibnu Taimiyyah*, terjemahan Anas Mahyuddin, "Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah", Bandung: Pustaka, 1983.
- Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.

- Nahrawi, Imam, *Moralitas Politik PKB: Aktualisasi PKB sebagai Partai Kerja, Partai Nasional dan Partai ModerN*, Malang: Averroes Press, 2005.
- Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU apa NU dibodohi?*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 1999.
- Patoni, Ahmad, Dr. H, *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Piliang, Yasraf, A., *TRANSPOLITIKA; Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Bandung: Jelasutra Cet III 2005.
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Rozaki, Abdur, *Menabur Karisma Menuai Kuasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Zuhro, Siti, R, dkk., *DEMOKRASI LOKAL; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.